



Peran Agama dalam Pemilihan Pemimpin pada Tahun 2019

**Fiona Sastrit¹, Nathan Khair Jemal Putra Herdianto²,
Hanifa Khayla Putri³, Muhammad Althaaf Arbarri⁴,
Syakirah Khalda⁵**

Universitas Pembangunan Jaya^{1,2,3,4,5}

e-mail: fiona.sastrit@student.upj.ac.id

Abstract

Indonesia is a country known for its diverse cultural characteristics that are not limited by religion. The election of a leader who refers to a particular faith-based group creates a sense of pride and solidarity within a community. However, this positive impact is quite exclusive and does not include other communities or groups that are not based on a particular religion, which is one of the factors in the emergence of discrimination and conflict between different religious groups and the emergence of anti-religious feelings among minority groups. This research uses a case study method with Source Analysis related to the 2019 Presidential Election in Indonesia. The analyzed data will be interpreted to determine the role of religion in executive elections. Indonesian society has a demographic majority of Muslims, and many parties use this as a tool to achieve their success by portraying their piety ahead of elections. Understanding of inter-religious tolerance needs to be improved through formal and informal education, including social media and public campaigns with an understanding of the importance of maintaining inter-religious harmony and that the selection of leaders should be done wisely and not be influenced by religious or persuasive factors.

Keywords: *The Role of Religion, Campaign, Election of Leaders.*

Abstrak

Indonesia merupakan sebuah Negara yang dikenal dengan ciri khas beragam budaya yang tidak terlimitasi oleh agama. Hasil pemilihan seorang pemimpin yang merujuk pada suatu kelompok tertentu berbasis agama memunculkan rasa kebanggaan dan solidaritas dalam sebuah komunitas. Namun dampak positif tersebut cukup eksklusif dan tidak mencakup komunitas atau kelompok lain yang tidak berbasis sebuah agama tertentu yang menjadi salah satu faktor munculnya diskriminasi dan konflik antar kelompok agama yang berbeda serta munculnya perasaan anti-agama di kalangan kelompok minoritas. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan Analisis Sumber terkait Pilpres 2019 di Indonesia. Data yang dianalisis akan diinterpretasikan untuk menentukan peran agama dalam pemilihan eksekutif. Masyarakat negara Indonesia memiliki demografis mayoritas penganut agama Islam, dan banyak pihak yang menjadikan hal ini sebagai sebuah alat untuk meraih kesuksesannya dengan pencitraan ketakwaannya menjelang pemilu. Pemahaman tentang toleransi antar umat beragama perlu ditingkatkan melalui pendidikan formal dan informal, termasuk media sosial dan kampanye publik dengan diberi pemahaman tentang pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama dan bahwa pemilihan pemimpin seharusnya dilakukan secara bijaksana dan tidak dipengaruhi oleh faktor agama atau persuasif.

Kata kunci: Peran Agama, Kampanye, Pemilihan Pemimpin.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang berjumlah 273,52 juta jiwa penduduk, dengan 6 agama yang telah diakui di Indonesia. Meskipun demikian, mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, sebanyak 237,53 juta jiwa per 31 Desember 2021, setara dengan setengah populasi penduduk di Indonesia. Oleh karena itu, kerap sekali menjadi pro dan kontra terhadap pemilihan pemimpin. Hal tersebut dapat kita lihat dari sejarah pemimpin Indonesia. Mulai dari pemimpin pertama Indonesia Ir. Soekarno sampai dengan Joko Widodo, beliau sekalian memeluk agama Islam. Indonesia sendiri merupakan negara demokratis yang tidak menjadikan syari'at Islam sebagai dasar negaranya (Benu *et al.*, 2020). Namun, pada kenyataannya mayoritas masyarakatnya cenderung memprioritaskan orang kepercayaan yang sama.

Aspek penting yang biasanya diperhatikan oleh golongan masyarakat mayoritas untuk memilih pemimpinnya ialah didasari oleh etnis, suku, golongan dan agama. Hal ini juga tidak terlepas dari kepentingan politik. Maka dari itu, penting sekali masyarakat dapat berfikir kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh bias yang ada, serta dapat menilai berdasarkan kemampuan dan pemahaman tentang kebutuhan rakyat (Supriyanto *et al.*, 2022). Agama dalam hal ini memiliki pengaruh besar terhadap pemilihan pemimpin juga memberikan dampak yang seringkali muncul menjelang pemilu, seperti banyaknya partai politik yang lebih mengutamakan pencitraan keimanan dan ketakwaan beragama sebagai sarana untuk meraih kemenangan. Pendekatan tersebut digunakan untuk menggali nilai keyakinan beragama yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Hubungan antara 'agama' dan 'negara', atau lebih tepatnya antara 'politik' dan 'agama', selalu tergantung pada dinamika negara dan kehidupan masyarakat dalam Negara (Supriyanto and Permatasari, 2022). Perdebatan tentang masalah ini kembali memanas di masyarakat luas tanah air setelah pemilihan presiden 2014. Di sisi lain berdiri sebuah kelompok yang diidentifikasi sebagai "religius". Kedua istilah pengenalan ini lebih tepat digunakan di negara asal Indonesia istilah 'sekuler' dan 'religius' yang biasa digunakan dalam literatur barat tentang sosiologi agama dan politik. Religius merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan agama atau kepercayaan dalam kehidupan seseorang. Hal ini dapat mencakup keyakinan tentang Tuhan, praktik ibadah, dan nilai-nilai moral dan spiritual yang dipegang oleh seseorang. Orang yang religius mungkin mempercayai adanya kekuatan supernatural dan mengikuti aturan-aturan dan praktik-praktik agama tertentu.

Sekuler di sisi lain berkaitan dengan pemisahan agama dan kehidupan sehari-hari atau pemerintahan. Konsep ini dapat mencakup pandangan bahwa keputusan politik dan sosial seharusnya didasarkan pada pertimbangan rasional dan bukan pada keyakinan agama. Beberapa orang sekuler mungkin tidak mempercayai adanya kekuatan supernatural atau memandang agama hanya

sebagai aspek kehidupan pribadi dan bukan sesuatu yang harus mempengaruhi kebijakan publik. Perlu dicatat bahwa religius dan sekuler bukanlah dua kutub yang mutlak terpisah, tetapi lebih merupakan spektrum yang berkaitan dengan sejauh mana agama mempengaruhi kehidupan seseorang atau masyarakat (Supriyanto, 2022). Ada juga orang-orang yang mungkin memiliki pandangan yang berbeda dalam hal ini, seperti agnostik atau atheis yang dapat dianggap sebagai non-religius, tetapi tidak selalu dapat dikategorikan sebagai sekuler.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, yakni dengan menganalisis data dari sumber-sumber yang berhubungan dengan pemilihan umum presiden Indonesia 2019, seperti data dari lembaga survei, data dari media, dan data dari organisasi masyarakat sipil. Data yang dianalisis akan diinterpretasikan untuk mengetahui peran agama dalam pemilihan pemimpin. Sementara itu, penelitian studi kasus (*case study*) adalah salah satu bentuk penelitian kualitatif yang berbasis pada pemahaman dan perilaku manusia berdasarkan pada opini manusia (Polit & Back 2014). Subjek dalam penelitian dapat berupa individu, group, instansi maupun masyarakat (Tyas and Supriyanto, 2022). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran agama dalam pemilihan pemimpin, khususnya dalam Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019. Dalam jurnal ini, akan dianalisis bagaimana faktor agama mempengaruhi pandangan dan sikap masyarakat dalam memilih pemimpin di Indonesia.

PEMBAHASAN

Dalam pemilihan pemimpin di Indonesia juga tidak ada kejelasan tentang keharusan seorang pemimpin harus beragama apa dan berkriteria sama dengan agama mayoritas yang ada. Tetapi seorang calon pemimpin harus beragama dan bertanggung jawab akan kebijakannya nanti. Dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 22 tahun 2018 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden, ada beberapa syarat menjadi pasangan calon diantaranya ialah:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
2. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945,
3. Tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri,
4. Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya,
5. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela,
6. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau DPRD, dan lain sebagainya.

Sejak awal kemerdekaan hingga saat ini presiden dan wakil presiden Indonesia selalu beragama Islam. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam sehingga berpengaruh pada hasil pemilihan sebab suara

mayoritas. Dapat dilihat pada poin nomor satu bahwa syarat menjadi presiden dan wakil presiden ialah "Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa" tidak merujuk pada satu agama tertentu untuk menjadi bakal calon presiden dan wapres melainkan memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada penganut agama lain untuk menjadi pemimpin (Supriyanto, 2022). hal ini membuktikan bahwa tidak adanya unsur keharusan bahwa hanya penganut agama islam yang dapat menjadi pemimpin.

Para pendiri bangsa atau *The Founding Fathers* Indonesia pada tahun 1945 sepakat untuk mendirikan bangsa dan negara dalam kompromi tingkat tinggi, persoalan "nasionalis" dan kedua kelompok tersebut mungkin hanya mewakili sebagian kecil dari mayoritas yang diam. Penggunaan kedua istilah ini semakin sering muncul karena kemampuannya menaklukkan dan menguasai 'ruang publik', termasuk media sosial. Sekelompok pegiat media sosial berbendera "Saracen" yang tak henti-hentinya menyebarkan berita bohong (hoax) sejak 2015, secara terbuka membenarkan adanya perebutan kekuasaan antara kedua kelompok tersebut termasuk media sosial.

Ruang publik khususnya di media sosial yang dikuasai oleh generasi milenial (digital native) dipadati dan dijejali oleh berita-berita bohong, berita palsu yang mengadu domba, memecah belah, memfitnah antara kelompok bangsa cepat atau lambat akan merusak dan menghancurkan persatuan dan hidup bersatu berbangsa dan bernegara jika tidak diantisipasi sedikit pun. Maka dengan sendirinya akan mengantarkan Indonesia ke jurang proses Balkanisasi, jika para elit politik (trias politika), agama, tokoh masyarakat dan masyarakat sipil pada umumnya tidak mengambil langkah dan tindakan yang tepat dan mencari jalan keluar yang jitu. Sebab itu juga, seminar untuk memperbincangkan kembali tema Merawat Toleransi, Demokrasi dan Pluralitas Keberagamaan, Mencari Masukan Gagasan untuk Pengembangan Kapasitas Peran FKUB sangat tepat waktunya ketika situasi kebangsaan sedang tidak begitu kondusif dengan semakin maraknya hembusan potensi intoleransi, gesekan antara kelompok keagamaan, kekerasan bernuansa agama dan penderitaan atas nama agama semakin menguat di berbagai daerah di tanah air.

Beberapa catatan yang perlu diungkapkan, direnungkan dan dipertimbangkan kembali pada saat kita hendak mencari solusi paradoks hidup berbangsa dan beragama di beberapa negara dan sebagian di tanah air lebih-lebih bagi pegiat FKUB di manapun berada, yaitu agama, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, pengembangan pemahaman nilai-nilai kebajikan fundamental agama dalam negara-bangsa, waspada terhadap sumber-sumber intoleransi keagamaan, dan pendidikan agama di ruang publik. Tiga tahapan utama yang dilalui bangsa Indonesia untuk mereduksi politik identitas, yaitu:

1. Tahap Konsolidasi Kebangsaan (1945-1957)

Tahap ini dimulai sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 hingga awal tahun 1957. Pada masa ini, bangsa Indonesia fokus pada upaya konsolidasi

kebangsaan, di mana perbedaan etnis, agama, dan golongan politik diupayakan untuk direduksi dan digantikan dengan semangat persatuan dan kesatuan nasional. Salah satu contohnya adalah dengan pembentukan ideologi Pancasila sebagai dasar negara yang mengakomodasi berbagai perbedaan dan kepentingan masyarakat Indonesia.

2. Tahap Kebangsaan dan Modernisasi (1957-1998)

Tahap kedua dimulai sejak tahun 1957 hingga tahun 1998. Pada masa ini, bangsa Indonesia fokus pada upaya modernisasi dalam berbagai bidang, termasuk di bidang politik. Selama masa Orde Baru, pemerintahan Soeharto berusaha menekan politik identitas dan mempromosikan kebangsaan melalui berbagai program pembangunan nasional. Salah satu contohnya adalah program transmigrasi yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antara daerah yang padat penduduk dengan daerah yang masih tergolong kosong.

3. Tahap Demokratisasi dan Multikulturalisme (1998-sekarang)

Tahap ketiga dimulai sejak reformasi pada tahun 1998 hingga sekarang. Pada masa ini, bangsa Indonesia fokus pada upaya demokratisasi dan multikulturalisme, di mana perbedaan identitas diakui dan dihargai sebagai bagian dari keanekaragaman Indonesia. Salah satu contohnya adalah pengakuan terhadap hak-hak minoritas, seperti hak orang asli Papua, hak perempuan, dan hak-hak kelompok agama tertentu. Hal ini tercermin dalam berbagai undang-undang dan kebijakan yang menjamin hak-hak dan kebebasan masyarakat Indonesia secara merata.

Tahapan-tahapan yang dilalui bangsa Indonesia untuk mereduksi politik identitas sangat penting karena dapat membantu memperkuat keberadaan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Beberapa alasan mengapa tahapan tersebut antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran kebangsaan

Dengan adanya tahapan konsolidasi kebangsaan, bangsa Indonesia menjadi lebih sadar akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam memperkuat negara. Hal ini dapat membantu mencegah terjadinya konflik dan perselisihan yang dapat merusak stabilitas negara.

2. Mendorong modernisasi

Tahapan kebangsaan dan modernisasi membantu Indonesia untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini dapat membantu Indonesia untuk menjadi negara yang lebih maju dan kompetitif.

3. Mengakomodasi keanekaragaman

Dalam tahapan demokratisasi dan multikulturalisme, negara Indonesia mengakui keberagaman dan keragaman identitas masyarakatnya. Hal ini dapat membantu meningkatkan rasa keadilan dan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan politik, sehingga dapat membantu memperkuat demokrasi dan stabilitas negara.

4. Meningkatkan hubungan internasional

Dengan adanya tahapan tersebut, Indonesia dapat membangun hubungan internasional yang lebih baik dan menjalin kerja sama dengan negara-negara lain dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, dan sosial-budaya. Hal ini dapat membantu meningkatkan posisi Indonesia dalam kancah internasional dan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Tidak melaksanakan tahapan untuk mereduksi politik identitas dapat memiliki konsekuensi yang merugikan bagi negara dan masyarakat Indonesia. Beberapa akibat yang dapat terjadi antara lain:

1. Konflik dan perselisihan

Perbedaan identitas harus diakomodasi dengan baik, hal ini dapat menyebabkan terjadinya konflik dan perselisihan antara kelompok-kelompok yang berbeda. Konflik dan perselisihan ini dapat merusak stabilitas dan keamanan negara. Menurut Laporan Kebebasan Beragama Internasional Tahunan (USCIRF 2021), terdapat sekitar 56 negara di dunia yang melaporkan adanya tingkat diskriminasi berbasis agama yang signifikan karena perbedaan identitas tidak diakomodasi dengan baik. Hal ini meliputi larangan atau pembatasan terhadap praktik keagamaan, penganiayaan terhadap minoritas agama, dan pelanggaran terhadap kebebasan beragama.

2. Penurunan kualitas hidup masyarakat

Dilakukan upaya modernisasi yang memadai, negara Indonesia dapat tertinggal dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur apabila hal tersebut tidak dilakukan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup masyarakat dan berdampak pada kemiskinan serta ketimpangan sosial-ekonomi.

3. Penurunan daya saing negara

Dilakukan upaya untuk meningkatkan kesatuan dan persatuan bangsa, jika tidak dilakukan Indonesia dapat kehilangan posisinya dalam kancah internasional dan penurunan daya saing negara dalam berbagai bidang. Penelitian oleh Alberto Alesina menunjukkan bahwa politik identitas yang intens dapat menurunkan daya saing suatu negara. Mereka menemukan bahwa negara dengan polarisasi etnis yang tinggi cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan negara yang lebih homogen secara etnis (Alesina et al., 2016).

4. Pemecahbelahan masyarakat

Perlu mengakomodasi keanekaragaman dan keragaman identitas masyarakat, jika tidak dilakukan dapat memperkuat pemecahbelahan dalam masyarakat dan memperburuk konflik antar kelompok.

Politik identitas yang muncul akhir-akhir ini tidak pernah dialami bangsa Indonesia dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara. Setidaknya ada tiga fase yang bisa direkam dan ditangkap. Yang pertama adalah peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Sumpah Pemuda terjadi setelah berakhirnya Perang

Dunia I (Latif 2017). Sumpah Pemuda merupakan momen pertama yang sangat penting sebagai akar dan cikal bakal persatuan NKRI 17 tahun mendatang. Pakta pemuda yang membara saat itu adalah baginya untuk mendeklarasikan tiga tonggak penting sebagai dasar kemerdekaan Indonesia. Wilayah Indonesia meliputi seluruh pulau di Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Itu disebut 'Wang Nusa'. Kedua, bangsa. Kewarganegaraan yang mereka akui dan setuju adalah warga negara Indonesia. Mereka sepakat bahwa bahasa yang dipersatukan adalah bahasa Indonesia. Berikut adalah dua catatan penting yang menunjukkan bahwa para Founding Fathers negara itu mampu meramalkan kompleksitas yang akan mereka hadapi di masa depan jika tidak menetap dan menetap di masa kini. Catatan pertama yakni, "agama". Mereka tidak mengatakan apapun tentang aspek agama.

Indonesia mayoritas penduduk Nusantara beragama Islam, namun tidak berupaya menjadikan Islam sebagai agama pemersatu bangsa, apalagi agama negara. Pemahaman dan wawasan tersebut tidak hanya didasarkan pada pengetahuan lokal (pengalaman nusantara) yang mengakar di Nusantara selama berabad-abad, tetapi juga pada sejarah politik negara-negara besar pada masa itu, yaitu Revolusi Prancis (Egarite, Liberté, Fraternite) dan Amerika Serikat (E Pluribus Unum; Deklarasi Kemerdekaan), dan hanya lima tahun sebelumnya (1923) di Turki merdeka. Kedua elemen ini selaras dalam pikiran kita dan menginspirasi langkah-langkah strategis ke masa depan. Bandingkan dengan Pakistan, Malaysia, dan negara-negara mayoritas Muslim lainnya di dunia. Catatan yang kedua adalah kesepakatan bahasa. Jangan lewatkan pilihan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Jika para pendiri negara telah "mengklaim" bahasa Jawa sebagai bahasa mayoritas penduduk, mereka akan dengan mudah memilih bahasa Jawa sebagai bahasa pemersatu. Tapi mereka tidak melakukannya.

Mereka memilih bahasa rumpun Melayu, di wilayah pulau Sumatera bagian Timur, sebagai bahasa pemersatu jika kelak di kemudian hari Indonesia merdeka. Golongan mayoritas rela berkorban demi mewujudkan persatuan bangsa untuk tidak menjadikan bahasa yang digunakan mayoritas penduduk sebagai bahasa pemersatu bangsa. Bandingkan dengan India, yang akhirnya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pemersatu mereka karena sulitnya memilih salah satu bahasa dari sekian banyak bahasa daerah sebagai bahasa pemersatu.

Kedua, saat pembentukan Undang-Undang Dasar (Konstitusi) negara Republik Indonesia. Seperti disinggung di atas adalah kerelaan para pendiri bangsa mayoritas Islam untuk menerima masukan dan saran dari perwakilan dari Indonesia bagian Timur yang menganut agama Kristen agar tidak mencantumkan 7 kata "Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dalam Preambule Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Mayoritas Founding Fathers of Islam mampu menggunakan multi referensi dan referensi

silang ketika menghadapi situasi baru yang membutuhkan penyelesaian segera. Ada dua referensi atau acuan utama yang ada. Pertama, rujukan bahasa Arab (*maraj*) yang berasal dari Timur Tengah dan merupakan bahasa Arab, dalam hal ini merupakan khazanah para intelektual dan cendekiawan muslim sepanjang sejarah, Maqashid al-Syari'ah (dasar Islam yang memuat khazanah intelektual para cendekiawan). Bagi para pemikir Barat berbahasa Belanda dan Inggris yang diambil dari sejarah dunia, khususnya Eropa dan Amerika berbekal kearifan lokal (khazanah intelektual nusantara) yang luar biasa melimpah, dua kekuatannya, Islam dan Barat, yang memandu pendirian ayah untuk membuat keputusan yang cepat dan akurat dalam waktu. Kekuatan dan kemampuan untuk bernegosiasi dan menggabungkan sumber ilmiah (Supriyanto and Rosmalia, 2021). Jika saja tidak ada negosiasi, kompromi dan konteks (Kalimatun sawa') antar para tokoh pendiri bangsa saat itu maka tidak mungkin lahir apa yang kita kenal sekarang sebagai Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai "dasar filsafat" (*Philosophische Grondslag*) atau "pandangan dunia" (*Weltanschauung*) dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketiga, ada dua organisasi Islam di Indonesia, Muhammadiyah (1912) dan Nahdlatul Ulama (1926), yang berdiri kokoh jauh sebelum Indonesia merdeka (1945). Kedua organisasi Islam ini sekarang menjadi dua organisasi masyarakat sipil muslim terbesar di dunia. Kedua organisasi Islam ini menjadi pilar penting pendukung kuat berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dan Kebhinekaan. Tokoh-tokohnya duduk dalam Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sebutlah sebagai contoh KH, Kahar Moezakir (Muhammadiyah) dan KH Wachid Hasjim (Nahdlatul Ulama) yang menyetujui dan menerima himbauan untuk tidak mencantumkan 7 kata dalam Piagam Jakarta atau dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara tidak pernah sepi dari aral melintang dalam perjalanan sejarah selama 72 tahun merdeka. Dalam masa orde baru, era Soeharto, ketika pemerintah menginginkan Pancasila tidak hanya sebagai asas berbangsa dan bernegara tetapi juga berorganisasi sosial kemasyarakatan, maka tidak semua organisasi Islam saat itu menyetujui usul pemerintah tersebut.

Ormas-ormas Islam menganggap cukup memasukkan asas-asas agama sebagai asas pengorganisasian, sekalipun Pancasila tidak perlu dicantumkan. Setelah perdebatan panjang di kalangan umat Islam, Khusus di lingkungan Muhammadiyah, KH AR Fachruddin yang sejak tahun 1968 menjadi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah hingga tahun 1990 memutuskan untuk memasukkan Pancasila sebagai asas organisasi (Muhammadiyah). Ia menjelaskan, pencantuman Pancasila sebagai asas ormas Islam seperti memakai "helm" saat mengendarai sepeda motor, bahkan digalakkan oleh pemerintah saat itu. Tidak ada salahnya memakai "helm" demi keselamatan diri sendiri. Penggunaan "helm" juga tidak mempengaruhi keberadaan tubuh manusia secara keseluruhan. Demikian pula, pencantuman Pancasila sebagai landasan ormas Islam tidak mempengaruhi eksistensi ormas Islam (AR 2017, 116-17).

Nahdlatul Ulama, KH Ahmad Shiddiq, menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah “bentuk akhir” Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada lagi manipulasi (Moesa 2007, 125). Ketika Indonesia dilanda badai transnasionalisme, gerakan ISIS-nya dan banyak lagi, Muhammadiyah Society, pada konferensi Makassar 2015, menyerukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), UUD 1945, Pancasila, dan Kebhinekaan. Syahadat” sebagai “kesepakatan bersama dan saksi kebangsaan” tidak perlu lagi ditentang atau dikoordinasikan (PP Muhammadiyah 2017).

Pendidikan dan pemahaman tentang toleransi antar agama harus terus ditingkatkan di Indonesia. Masyarakat harus diberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga harmoni antar agama dan bahwa pemilihan pemimpin harus dilakukan secara bijak dan tidak dipengaruhi oleh faktor agama atau kepercayaan. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan informal, termasuk melalui media sosial dan kampanye publik. Berikut adalah beberapa data dan detail terkait dengan materi pemilihan pemimpin bergaris agama di Indonesia:

1. Identitas agama, menurut data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia, pada Pemilihan Umum Presiden 2019, sekitar 86,7% penduduk Indonesia mengidentifikasi diri mereka sebagai muslim. Selain itu, terdapat pula komunitas Hindu, Buddha, Kristen, dan Konghucu yang masing-masing memiliki persentase kurang dari 10 persen.
2. Isu agama, isu agama menjadi salah satu isu yang banyak dibahas pada Pemilihan Umum Presiden 2019 di Indonesia. Menurut data dari lembaga survei Indikator Politik Indonesia, isu agama menjadi salah satu isu yang paling banyak dibicarakan oleh kedua kubu calon presiden, yakni Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Isu agama yang dibahas di antaranya adalah keislaman calon presiden, dukungan dari ormas-ormas Islam, dan isu intoleransi agama.
3. Survei pilihan pemilih berdasarkan agama, beberapa lembaga survei di Indonesia juga melakukan survei terkait pilihan pemilih berdasarkan agama pada Pemilihan Umum Presiden 2019. Survei dari Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas pemilih muslim memilih pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, sementara pemilih non-muslim mayoritas memilih pasangan Prabowo-Sandiaga Uno. Sedangkan survei dari lembaga survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa mayoritas pemilih Kristen, Katolik, dan Hindu memilih pasangan Prabowo-Sandiaga Uno.
4. Dampak pemilihan pemimpin bergaris agama membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positifnya adalah munculnya kebanggaan dan solidaritas antara kelompok yang memiliki agama yang sama. Namun, dampak negatifnya adalah munculnya diskriminasi dan konflik antar kelompok agama yang berbeda, serta munculnya sentimen anti-agama dari kelompok yang merasa terpinggirkan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk memilih pemimpin yang dapat memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan mampu menjaga harmoni antar agama.

KESIMPULAN

Berdasarkan data dan detail terkait pemilihan pemimpin bergaris agama di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa agama memiliki peran yang signifikan dalam politik di Indonesia. Isu agama menjadi salah satu isu yang banyak dibahas pada Pemilihan Umum Presiden 2019, dan pemilih cenderung memilih calon presiden berdasarkan agama yang dianutnya. Akhirnya, pemilihan pemimpin di Indonesia haruslah didasarkan pada kriteria yang tepat dan akurat, yaitu kemampuan, kepemimpinan, integritas, dan visi misi. Peran agama haruslah menjadi faktor yang memperkuat nilai-nilai kebangsaan, bukan menjadi faktor yang memecah belah masyarakat. Dengan demikian, Indonesia dapat terus maju dan berkembang sebagai negara yang plural dan demokratis.

Pemilihan pemimpin adalah sebuah proses demokrasi yang penting dalam menjalankan suatu negara. Pemilihan pemimpin yang baik dan tepat akan membawa dampak positif bagi kemajuan suatu negara, sebaliknya, pemilihan pemimpin yang buruk dapat menimbulkan kerugian yang besar. Dampak dari pemilihan pemimpin yang memiliki agama yang sama dengan mayoritas dapat membawa dampak positif atau negatif bagi masyarakat, tergantung pada cara pemimpin tersebut memperlakukan kelompok agama yang berbeda dan mampu menjaga harmoni antar agama. Oleh karena itu, penting bagi pemimpin Indonesia untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan menjaga keharmonisan antar agama. Selain itu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk memilih pemimpin yang memiliki visi dan misi yang jelas dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin, tanpa memandang perbedaan agama. Pemimpin yang terpilih juga harus mampu menjaga kebebasan beragama dan menghindari diskriminasi atau konflik antar kelompok agama.

Sebagai negara yang pluralistik, keberagaman agama di Indonesia harus dihargai dan diakui sebagai bagian dari identitas nasional yang unik. Dengan memilih pemimpin yang dapat menghargai keberagaman agama, masyarakat Indonesia dapat memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan memperkuat persatuan dan kesatuan sebagai bangsa. Selain itu, upaya-upaya edukasi dan dialog antar agama juga penting dilakukan untuk mendorong pemahaman dan toleransi antar kelompok agama. Pendidikan dan pengenalan tentang keberagaman agama sejak dini dapat membantu mengurangi konflik dan meningkatkan pemahaman antar kelompok agama. Selain itu, dialog antar pemimpin agama dan masyarakat dapat membantu memperkuat harmoni antar agama dan mengurangi ketegangan.

Di era digital seperti sekarang, media sosial juga memiliki peran yang penting dalam membentuk opini dan persepsi masyarakat tentang agama dan politik. Dalam hal ini, media massa memegang peran penting untuk menyebarkan informasi yang objektif dan tidak memihak pada satu agama atau kepercayaan tertentu. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk memerangi hoax, propaganda, dan ujaran kebencian yang dapat memicu konflik antar kelompok

agama. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat secara keseluruhan harus bersama-sama memerangi penyebaran informasi yang tidak benar dan merusak keharmonisan antar agama. Media massa juga harus mampu memfasilitasi diskusi dan debat antar calon pemimpin secara konstruktif, sehingga masyarakat dapat memilih pemimpin yang terbaik dan tepat.

Secara keseluruhan, pemilihan pemimpin bergaris agama di Indonesia memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus memilih pemimpin yang dapat menghargai keberagaman agama, memperkuat nilai-nilai kebangsaan, dan menjaga keharmonisan antar agama. Dalam menghadapi pemilihan pemimpin di masa depan, negara harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan agama dan kepentingan nasional. Agama tidak boleh menjadi alat untuk memenangkan kekuasaan atau mengambil keuntungan politik tertentu. Sebaliknya, agama harus digunakan sebagai sarana memperkuat nilai-nilai kebangsaan, seperti toleransi, keadilan, dan integritas. Hasil dan Pembahasan Dalam Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019, agama memiliki peranan penting di dalamnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi peran agama dalam pemilihan pemimpin, antara lain:

1. Identitas Agama

Identitas agama merupakan faktor penting dalam pemilihan pemimpin di Indonesia. Dalam pemilihan umum presiden Indonesia 2019, data dari beberapa lembaga survei menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia memilih calon presiden yang memiliki identitas agama yang sama dengan mereka.

2. Isu Agama

Isu agama juga memainkan peran penting dalam pemilihan pemimpin di Indonesia. Dalam Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019, banyak dibahas oleh para calon presiden dan pendukungnya. Isu agama yang paling sering dibahas adalah terkait dengan toleransi antar agama, hak-hak minoritas agama, dan hubungan antara negara dan agama.

3. Pendukung Agama

Pendukung agama juga mempengaruhi pemilihan pemimpin di Indonesia. Pada Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019, terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang memilih calon presiden yang dianggap mendukung agama dan kepercayaan mereka. Beberapa calon presiden bahkan menggunakan isu agama untuk memenangkan dukungan dari pendukung agama.

DAFTAR PUSTAKA

Abu R, Ibrahim M., Ian, and Ibrahim M. AR. Markham (2002). "A Post-September 11 Critical Assessment of Modern Islamic History." In *11 September: Religious Perspective on the Causes and Consequences*, 33-34. Oxford: Oneworld Publications.

- AbuKhalil, As'ad. n.d. "The 8 Proxy Wars Going On in Syria Right Now | HuffPost." Accessed August 31, 2017.
- Abu-Rabi', M., ed. (2010). *The Contemporary Arab Reader on Political Islam*. London and New York: Pluto Press.
- Alesina, A., et al. (2016). Ethnic Diversity and Economic Performance: An Empirical Investigation Using Survey Data. *Journal of International Economics*, 99, 123-138.
- AR, Sukriyanto (2017). *Biografi Pak AR: K.H. Abdur Rozaq Fachruddin (Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah 1968-1990)*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Auda, Jasser (2008). *Maqasid Al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London dan Washington: The International Institute of Islamic Thought. Axolothl. (n.d.). JDIIH KPU RI. <https://jdih.kpu.go.id/>
- Benu, Y. S. I. P. et al. (2020) *Human Resource Management (HRM) In Industry 5.0*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Hadiz, Vedi R (2016). *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge: Cambridge University Press. Hodgson, Marshall G. S. 1974. *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization, Volume One, The Classical Age of Islam*. Chicago and London: The University of Chicago Press.
- Kementrian Agama. (2018). *Al Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementrian Agama.
- Kompas (2017). "Kejahatan Siber: Produsen Hoaks Incar Peristiwa Politik." *Kompas*, August 26, 2017, 26/8/2017 edition.
- Latif, Yudi (2017). "Pancasila: Idealitas Dan Realitas." presented at the AIPI Inagurasi, Universitas Pancasila, July 24. Martin, Richard C. 1985. "Islam and Religious Studies: An Introductory Essay." In *Approaches to Islam in Religious Studies*, edited by Richard C. Martin, 8. Tucson: The University of Arizona Press.
- LKiS. Parekh, Bhikku (2000). *Rethinking Multikulturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Meijer, Roel (2009). "Introduction." In *Global Salafism: Islam's New Religious Movement*, edited by Roel Meijer, 9-13. London: Hurst & Company.

- Moesa, Ali Maschan. (2007). Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama. Pemikiran KH Ahmad Siddiq. Yogyakarta:
- Paz, Reuven. (2009). "Debates within the Family: Jihadi-Salafi Debates on Strategy, Takfir, Extremism, Suicide Bombing and the Sense of the Apocalypse." In *Global Salafism: Islam's New Religious Movement*, edited by Roel Meijer, 267-80. London: Hurst & Company.
- Pew Research Center (2018). *The Widening Gap between the Global North and South in Religious Freedom*.
- PP Muhammadiyah, Majelis Pendidikan Kader. 2017. *Negara Pancasila: Darul 'Ahdi Wasy-Syahadah: Perspektif Teologis, Dan Ideologis*. Yogyakarta: Penerbit Majelis Kader PPM.
- Schwartz, Stephen Sulaiman. (2007). *Dua Wajah Islam: Moderatisme vs Fundamentalisme Dalam Wacana Global (The Two Faces of Islam)*. Translated by Hodri Arief. Blantika.
- Supriyanto, A. (2022) 'Komitmen Organisasi : Ditinjau dari Kepemimpinan Transformasional dan Kepemimpinan Transaksional Yang Dimoderasi Leader-Member Exchange', 11(1).
- Supriyanto, A. et al. (2022) *Pemberdayaan Masyarakat Desa di Masa Pandemi Covid-19*. Sukabumi: Farha Pustaka.
- Supriyanto, A. and Permatasari, R. D. (2022) 'Kesuksesan Muslimah Pelaku UMKM : Peran Dimensi Entrepreneurial Orientation', 10, pp. 267-286.
- Supriyanto, A. and Rosmalia, V. (2021) 'Pemanfaatan Social Media Sebagai Pemasaran Bisnis Di Era Society 5.0', *Janaka ...*, 02(02), pp. 55-65. Available at:<http://ejournal.lppm-stieatmabhakti.id/index.php/JANAKA/article/view/215>.
- Supriyanto Agus (2022) 'Peran Nilai-Nilai Islami Dalam Kewirausahaan Untuk Menunjang Sebuah Kinerja Bisnis', *El-Hekam: Journal of Islamic Studies*, 7(1), pp. 69-82.
- Tyas, D. A. and Supriyanto, A. (2022) 'Keputusan Konsumen Dalam Memilih Hotel Syariah: Ditinjau Dari Halal Lifestyle, Muslim Friendly Facilities, Dan Knowledge', *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 11(2), pp. 141-152. doi: 10.46367/iqtishaduna.v11i2.766.
- United States Commission on International Religious Freedom (2021). *Laporan Kebebasan Beragama Internasional Tahunan USCIRF 2021*.